

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN
MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT**

SKRIPSI



OLEH :

GALANG SURYA MAHENDRA
NIM : 1312000112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN
MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT**

SKRIPSI



Oleh :

Galang Surya Mahendra

1312000112

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2024

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT

SKRIPSI



Oleh :

Galang Surya Mahendra

1312000112

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN
MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

Galang Surya Mahendra

NBI:1312000112

Dosen Pembimbing:



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310860065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN
MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT

Oleh:
Galang Surya Mahendra
NIM: 1312000112

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: Rabu, 26 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No : 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI :

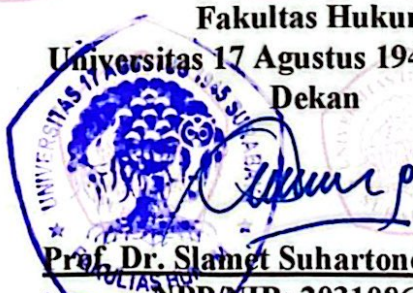
Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP/NIP: 20310860065

Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.HUM., PHD
NPP/NIP: 20310180776

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H
NPP/NIP: 20310160711



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galang Surya Mahendra
NIM : 1312000112
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian APPIHI: Jurnal Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum dengan judul:

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT

Benar bebas plagiasi dari plagiasi apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 4 Juli 2024



Galang Surya Mahendra

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galang Surya Mahendra
Nim : 1312000112
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian APPIHI: Jurnal Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum dengan judul:

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT

Benar bebas plagiasi dari plagiasi apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 4 Juli 2024



Galang Surya Mahendra

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galang Surya Mahendra
NIM : 1312000112
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS KELALAIAN MELINDUNGI DATA PRIBADI PASSPORT

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh di batalkan, serta di proses sesua dengan peraturan perundangyang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Juli 2024

nyataan,


Galang Surya Mahendra



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galang Surya Mahendra
NBI : 1312000112
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“Tanggung Gugat Pemerintah Atas Kelalaian Melindungi Data Pribadi Passport”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal : 4 Juli 2024



Galang Surya Mahendra

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur keharidat Allah SWT atas karuania yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari sebagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Genap 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan adminitrasi selama masa perkuliahan.
8. Ayah dan Ibu penulis yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang selalu di panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Kakak-kakak penulis yang memberikan dukungan penuh untu penulis.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum yang telah berteman baik dan saling mendukung secara emosional.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 4 Juli 2024



Galang Surya Mahendra

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Bapak Ibu SAYA, dan diri saya sendiri.

Terima kasih kepada Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, Skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar.

Terima kasih Ayah dan Ibu yang tidak pernah Lelah mempercayai dan mendukung saya.

Terima kasih untuk diriku hari ini, untuk diriku kemarin, untuk diriku yang akan datang.

Terima kasih telah bertahan dan tetap hidup sampai saat ini.

ABSTRAK

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara termasuk salah satunya data pribadi. Perlindungan data pribadi dapat ditemukan ketentuannya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh warga negara. Namun adanya kelalaian dari pemerintah dalam melindungi data seperti menjual arsip dokumen. Kejadian tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Warga memiliki hak untuk meminta ganti rugi sebagaimana Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan data pribadi dan ganti rugi akibat kelalaian dalam melindungi data pribadi paspor oleh instansi pelaksana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum ada dua yaitu bahan hukum primer dengan menggunakan berbagai peraturan perundang dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku hingga artikel jurnal. Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan cara mengkategorisasikan sesuai topik pembahasan dan menggunakan teknik analisis normatif perskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara/pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan upaya pencegahan serta peran lembaga pengawas dalam turut andil berperan melindungi data pribadi warga negara.

Saran yang dapat diberikan adalah mengatur secara eksplisit dan jelas tentang larangan penjualan data pribadi dan tata cara ganti rugi yang lebih jelas sehingga dapat melindungi hak-hak dari warga negara dengan lebih baik.

Kata kunci : tanggung gugat pemerintah, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, perlindungan data pribadi

ABSTRACT

The government's obligation to protect citizens includes personal data. The protection of personal data can be found in the Population Administration Law Article 79 paragraph (1) which states that individual data and population documents must be kept and protected by citizens. However, there is negligence from the government in protecting data such as selling document archives. This incident is included in the unlawful act by the government (onrechtmatige overheidsdaad). Residents have the right to request compensation as Article 2 states that every resident has the right to obtain personal data protection and compensation due to negligence in protecting passport personal data by the implementing agency.

This study uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. There are two sources and types of legal materials, namely primary legal materials using various laws and regulations and secondary legal materials using books and journal articles. The collection of legal materials is collected by categorizing according to the topic of discussion and using prescriptive normative analysis techniques.

The results of this study show that the state/government can be held accountable as mentioned in the Population Administration Law and prevention efforts as well as the role of supervisory institutions in taking part in protecting citizens' personal data.

The suggestion that can be given is to explicitly and clearly regulate the prohibition of the sale of personal data and clearer compensation procedures so that it can better protect the rights of citizens.

Keywords: government liability, unlawful acts by the government, personal data protection

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

2.1 Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah	15
2.2 Tanggung Gugat Pemerintah	18
2.3 Perlindungan Hukum	21
2.4 Perlindungan Data Pribadi	24
2.4.1 Pengertian Data Pribadi	24
2.4.2 Prinsip-prinsi Perlindungan Data Pribadi	32
2.4.3 Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi	32
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Tanggung Gugat Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi Data Pribadi Passport	37
3.1.1 Definisi Tanggung Gugat Pemerintah	37
3.1.2 Peraturan Perlindungan Data Pribadi	42
3.1.3 Bentuk Kelalaian Pemerintah	64
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi nya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah	75
3.2.1 Hak Korban.....	75
3.2.2 Mekanisme Perlindungan Hukum:	93
3.2.3 Upaya Pencegahan:.....	97
3.2.4 Peran Lembaga Pengawas	101
BAB IV PENUTUP.....	109
4.1 Kesimpulan	109
4.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113